



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Elemen *Support, Capacity, Value E-Government* pada Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak

Ika Puji Rahayu^{1*}, Budi Puspo Priyadi², Augustin Rina Herawati³

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, ikarahayu21.ir@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

³Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: ikarahayu21.ir@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the elements of Support, Capacity, and Value in the implementation of the Electronic Performance Accountability System for Government Agencies (E-SAKIP) in Demak Regency. The research employs a quantitative approach with data collection techniques using questionnaires and observations. The collected data were analyzed using the JASP application to test validity, reliability, and data description. The results indicate that the implementation of E-SAKIP still faces several challenges. In terms of Support, regulatory support remains suboptimal, as evidenced by the low level of socialization and understanding of existing policies. Regarding Capacity, most agencies have adequate infrastructure, such as internet access and budgets related to E-SAKIP, but there is still a shortage of competent human resources for its management. Meanwhile, the Value aspect shows that the implementation of E-SAKIP has benefited government agencies by improving efficiency and performance accountability, although it is not yet fully understood by all involved personnel. Overall, this study confirms that while E-SAKIP has been running relatively well, policy optimization, capacity-building for human resources, and periodic evaluations are still necessary to ensure that this system functions optimally in supporting government agency performance accountability.*

Keywords: *E-Government, E-SAKIP, Performance Accountability, Demak Regency, Support-Capacity-Value*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen Support, Capacity, dan Value dalam implementasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) di Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi JASP untuk menguji validitas, reliabilitas, dan deskripsi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-SAKIP masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek Support, dukungan regulasi masih belum optimal, terlihat dari rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan yang ada. Pada aspek Capacity, mayoritas instansi telah memiliki infrastruktur yang memadai, seperti akses internet dan anggaran terkait

E-SAKIP, namun masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaannya. Sementara itu, aspek Value menunjukkan bahwa penerapan E-SAKIP telah memberikan manfaat bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja, meskipun belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai yang terlibat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun E-SAKIP telah berjalan cukup baik, masih diperlukan optimalisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berkala untuk memastikan sistem ini dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: *E-Government*, E-SAKIP, Akuntabilitas Kinerja, Kabupaten Demak, *Support-Capacity-Value*

PENDAHULUAN

Pemerintahan modern saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government*. Kehadiran *E-Government* tidak lagi dilihat sebagai suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi semua negara yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Muliawaty & Hendryawan, 2020). *E-Government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dan aplikasi berbasis web oleh pemerintah, atau layanan elektronik, yang meningkatkan akses dan penyampaian layanan dan informasi pemerintah kepada warga negara, penduduk, bisnis, pemerintah, dan entitas terkait lainnya (Layne & Lee, 2001).

E-Government merupakan bagian penting dari pemerintahan digital yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dengan penggunaan internet virtual (Gant, 2008). Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2006). Elemen *Support E-Government* dilihat dari regulasi *E-Government* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan regulasi serupa. SPBE memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia (Choirunnisa et al., 2023). Pelayanan publik sangat diperlukan dalam pemerintahan terlebih lagi dengan penerapan SPBE maka pelayanan publik dapat menjadi lebih efisien dan efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang baik (Hamjen, 2023). Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerapkan *E-Government system*, yaitu: kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah tidak lagi memposisikan sebagai pihak yang dominan, tetapi mempertimbangkan posisinya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dan ketersediaan sumber daya, baik dari sisi warga negara maupun pihak pemerintah (Muliawaty & Hendryawan, 2020).

Pemerintah Kabupaten Demak adalah salah satu Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan *E-Government*. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam mengembangkan *E-Government* sudah ada ditandai dengan membangun situs *website* Pemerintah Daerah dengan nama *Demak.go.id*. (Utomo, 2004). Secara umum pengembangan *E-Government* di Kabupaten Demak cukup baik, meskipun ada beberapa elemen yang harus diperbaiki. Pengembangan *E-Government* belum menyediakan konten yang lengkap pada *website* Pemerintah Kabupaten Demak, belum siap beberapa instansi dalam pengelolaan

website, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan atau mengelola *website* dan pendanaan yang belum cukup (Jatmiko & Astuti, 2018). *E-Planning* yang diterapkan di Kabupaten Demak merupakan bentuk dari perwujudan *Good Governance* melalui *E-Government* yang bertujuan agar dokumen perencanaan terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat namun tidak semua rencana berjalan dengan baik. Aplikasi ini masih terjadi beberapa kendala dalam beberapa tahapan perencanaan ini sendiri (Maharani & Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, 2019).

Tabel 1. Indeks SPBE Kabupaten Demak

Kab./Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Demak	2,96	3,74	3,74	3,19	3,19	3,62
Prov. Jateng	3,67	3,85	3,85	2,74	3,34	4,26
Semarang Kota	3,27	3,3	3,3	2,98	3,38	3,83
Semarang Kab.	2,66	3,02	3,02	2,36	2,13	3,26
Grobogan	2,11	3	3	2,51	3,37	3,37
Kudus	2,72	2,73	2,98	2,53	3,38	4,23
Pati	2,27	3,22	3,22	2,75	2,75	3,74
Jepara	2,64	2,41	2,85	3,04	3,14	3,63
Rembang	2,35	2,78	3,11	2,76	3,19	3,64

Sumber : Laporan Evaluasi SPBE KemenPANRB 2018 - 2023

Kabupaten Demak telah memiliki regulasi E-Government, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan turunannya yaitu Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2018 – 2023 bersifat fluktuatif. Kabupaten Demak pernah mendapatkan indeks SPBE tertinggi kedua se-Jawa Tengah, dengan perolehan nilai 3,74 pada tahun 2019.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE. Tingkat kematangan layanan SPBE memiliki bobot paling tinggi dalam penilaian SPBE. Terjadi penurunan Nilai Tingkat Kematangan pada Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dari nilai 4 pada tahun 2021 turun menjadi nilai 3 pada tahun 2023 (tambahkan). sAplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kabupaten Demak (E-SAKIP) adalah sistem yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yang bias diakses melalui laman <http://sakip.demakkab.go.id/> untuk memfasilitasi pelaksanaan SAKIP pada 41 Perangkat Daerah. sesuai Peraturan Bupati Demak No. 64 Tahun 2021 (dihapus). Aplikasi ini digunakan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan bahan evaluasi peningkatan kinerja. Berdasarkan Surat **Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Demak No. 061/2490**, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan melaporkan capaian kinerja setiap triwulan melalui E-SAKIP. Aplikasi ini dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Demak bersama CV. Jasa Mitra Informatika.

Penggunaan aplikasi E-SAKIP tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Pemerintah daerah lain juga menggunakan aplikasi E-SAKIP sesuai dengan pengembangan pada masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Kota Manado telah menggunakan E-SAKIP namun terdapat kendala dalam berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Manado selaku monitoring pengelolaan program E-SAKIP (Jacobus et al., 2023). Aplikasi E-SAKIP berpengaruh besar terhadap kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Gitasih, dkk, 2023). Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan akreditasi baik dalam melaksanakan kinerja melalui E-SAKIP. Keberadaan E-SAKIP dapat berdampak pada

peningkatan kinerja pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan publik serta penyerapan anggaran sesuai dengan target (Sahoming et al., 2019).

Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Demak oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2016 – 2023 menunjukkan permasalahan bahwa Pemkab. Demak telah membangun aplikasi E-SAKIP meskipun pengintegrasian yang ada belum berjalan optimal, sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Informasi yang didapat dari grup *whatsapp* SAKIP Demak ditemukan bahwa terdapat Perangkat Daerah yang belum bisa melaporkan kinerja organisasi pada <http://sakip.demakkab.go.id> dikarenakan *error*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen *Support*, *Capacity*, dan *Value* dalam penerapan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) di Kabupaten Demak. Elemen *Support* mencakup dukungan kebijakan, sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang mendukung implementasi E-SAKIP. Elemen *Capacity* menyoroti kemampuan teknis dan manajerial perangkat daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sistem secara optimal. Sementara itu, elemen *Value* berfokus pada manfaat yang dihasilkan, baik dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, maupun efisiensi pelaporan kinerja pemerintah daerah. Dengan memahami ketiga elemen tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan implementasi E-SAKIP serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Demak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variable, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di Masyarakat (Martono, 2011).

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Definisi sampel menurut (Waruwu, 2023) adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sample. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* menurut (Sugiyono, 2019) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini, dengan ini peneliti akan menggunakan metode Krejcie-Morgan.

Tabel 2. Penentuan Sampel Metode Krejcie-Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351

90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Sumber: Krejcie-Morgan (1970)

Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Kasubbag Program dan Staf yang membidangi SAKIP pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang menggunakan [E-SAKIP](#). Populasi dalam penelitian ini adalah $3 \times 41 = 123$. Apabila menggunakan tabel Krejcie dan Morgan maka sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 92 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu kuesioner dan observasi. Metode kuesioner digunakan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab, baik secara langsung maupun melalui surat elektronik (Suryani dan Hendriyadi, 2016). Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Guttman, yang merupakan skala kumulatif dengan pilihan jawaban tegas Ya atau Tidak. Jawaban Ya diberi nilai tertinggi (1), sedangkan Tidak diberi nilai terendah (0). Skala Guttman memiliki sifat skala rasio, yang memiliki tingkatan dan jarak antar nilai, serta titik nol mutlak, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suatu kondisi atau sikap secara lebih objektif (Suryani dan Hendriyadi, 2016).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode observasi untuk memperoleh data yang lebih akurat. Observasi dalam konteks penelitian sosial melibatkan proses melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung keadaan yang diteliti (Tawakkal & Subekti, 2023). Peneliti akan mencatat atau merekam informasi yang diperoleh selama observasi guna memahami bagaimana sistem E-SAKIP di Kabupaten Demak diterapkan dalam praktik. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat mengamati perilaku pengguna, kendala yang dihadapi, serta efektivitas sistem dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Aplikasi JASP untuk menguji validitas data, reliabilitas data, dan deskripsi data. Uji validitas data bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas data digunakan untuk menguji konsistensi dan keandalan instrumen dalam mengukur variabel yang sama secara berulang. Selain itu, analisis deskripsi data dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai nilai persentase yang dicapai oleh masing-masing variabel, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pola data yang diperoleh dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Tingkat Element *Support* Pada Aplikasi Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Pemerintah Kabupaten Demak

P	Mean	Std. Deviation	Persentase Jawaban	
			Ya (%)	Tidak (%)
P1	0.00000	0.00000	0	100.00
P2	0.13043	0.33863	13.04	89.96
P3	0.00000	0.00000	0	100.00
P4	0.88043	0.32623	88.04	11.96
P5	1.00000	0.00000	100.00	0.00
P6	1.00000	0.00000	100.00	0.00
P7	0.93478	0.24826	93.48	6.52
P8	0.93478	0.24826	93.48	6.52
P9	0.45652	0.50084	45.65	54.35
			59.30	41.03

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan data tingkat *Element Support* pada aplikasi *Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (E-SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Demak, terlihat adanya variasi dukungan terhadap elemen-elemen yang diuji. Beberapa elemen menunjukkan tingkat dukungan yang sangat rendah, seperti P1 (Apakah sudah ada regulasi tentang E-SAKIP dalam bentuk Peraturan Bupati) dan P3 (Apakah regulasi E-SAKIP telah disosialisasikan pada Instansi anda bekerja?), di mana seluruh responden (100%) menjawab "Tidak", menandakan tidak adanya dukungan pada aspek tersebut. Begitu pula dengan P2 (Apakah sudah ada regulasi tentang E-SAKIP yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah?), yang hanya mendapatkan dukungan sebesar 13,04%, sementara sisanya (86,96%) menyatakan ketidaksetujuan.

Di sisi lain, elemen-elemen seperti P5 (Apakah kegiatan yang berkaitan dengan E-SAKIP tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran di Instansi Bapak Ibu bekerja?) dan P6 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja terdapat internet?) mendapatkan dukungan penuh dari seluruh responden (100%), menunjukkan bahwa aspek-aspek ini telah berjalan dengan baik dalam sistem E-SAKIP. Elemen lainnya, seperti P4 (Apakah dalam Peta Jabatan Instansi Bapak Ibu bekerja terdapat sumber daya manusia yang mengelola E-SAKIP (jabatan penelaah teknis kebijakan?)), P7 (Saya pernah mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi E-SAKIP), dan P8 (Sosialisasi penggunaan aplikasi E-SAKIP dilaksanakan secara rutin minimal 1 tahun sekali), juga memiliki tingkat dukungan yang tinggi, dengan persentase Ya masing-masing sebesar 88,04%, 93,48%, dan 93,48%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai elemen-elemen ini berfungsi dengan baik. Namun, elemen P9 (Apakah setelah mengikuti sosialisasi anda menjadi paham?) menunjukkan hasil yang lebih seimbang, dengan tingkat dukungan 45,65% dan ketidaksetujuan 54,35%, yang mengindikasikan adanya perbedaan pandangan di antara responden.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat dukungan terhadap elemen-elemen dalam E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Demak adalah 59,30%, sementara 41,03% responden masih menyatakan ketidaksepahaman terhadap elemen-elemen tertentu dalam sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar elemen sudah mendapatkan dukungan tinggi, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar sistem E-SAKIP dapat lebih optimal dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 4. Tingkat Element *Capacity* Pada Aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Pemerintah Kabupaten Demak

P	Mean	Std. Deviation	Persentase Jawaban	
			Ya (%)	Tidak (%)
P10	0.000	0.000	0	100,00
P11	0.070	0.250	6.52	93.48
P12	0.860	0.350	85.87	14.13
P13	0.930	0.250	93.48	6.52
P14	1.000	0.000	100,00	0,00
P15	1.000	0.000	100,00	0,00
P16	1.000	0.000	100,00	0,00
P17	1.000	0.000	100,00	0,00
P18	0.360	0.480	35.87	64.13
P19	0.000	0.000	0.00	100.00
P20	0.000	0.000	100.00	0.00
P21	1.000	0.000	100.00	0.00
P22	0.850	0.360	84.78	15.22
P23	0.840	0.370	83.70	16.30
P24	0.090	0.280	8.70	91.30
P25	0.000	0.000	0.00	100.00
P26	0.930	0.250	93.48	6.52
P27	0.000	0.000	0.00	100.00
P28	0.000	0.000	0.000	100.00
			57.495	39.311

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis tingkat *Element Capacity* pada aplikasi *Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (E-SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Demak, terlihat adanya variasi dalam tingkat penerimaan dan penggunaan sistem. Beberapa indikator menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat tinggi, seperti P14 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja disediakan PC komputer desktop untuk mengakses E-SAKIP?) hingga P17 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja dapat mengakses E-SAKIP melalui iphone?), P20 (Apakah pada aplikasi E-SAKIP tersedia menu pengaduan?), dan P21 (Apakah Bagian Organisasi Setda selaku pengampu E-SAKIP menyediakan Layanan dan konsultasi integrasi system missal WA grup ?), yang mencapai 100% respon Ya, menandakan bahwa elemen-elemen ini telah diimplementasikan dan diterima dengan baik oleh pengguna. Selain itu, indikator P12 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja pernah dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan E-SAKIP namun tidak ada anggarannya?), P13 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja internet memiliki kualitas yang baik?), P22 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja jabatan Kepala Dinas selaku penanggungjawab SAKIP tidak terjadi kekosongan?), P23 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja jabatan Kasubbag Program terjadi kekosongan?), dan P26 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja sudah ada pegawai yang memiliki sertifikat pelatihan/ BinteK E-SAKIP level Kabupaten) juga menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi dengan persentase di atas 80%, mencerminkan elemen-elemen yang relatif efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Namun, terdapat beberapa indikator dengan tingkat penerimaan yang rendah, seperti P10 (Apakah anggaran yang dimiliki Bagian Organisasi Setda selaku pengampu E-SAKIP telah mencukupi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan E-SAKIP?), P19 (E-SAKIP tidak pernah eror), P25 (Untuk mengisi kekosongan apakah Instansi Bapak Ibu menggunakan jasa

pihak lain dalam mengisi E-SAKIP?), P27 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja sudah ada pegawai yang memiliki sertifikat pelatihan/ Bintel E-SAKIP level Provinsi), dan P28 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja sudah ada pegawai yang memiliki sertifikat pelatihan/ Bintel E-SAKIP level Nasional), yang seluruhnya memiliki persentase jawaban Tidak sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa elemen-elemen tersebut belum berfungsi dengan baik atau belum diterapkan dalam sistem. Indikator P11 (Apakah di instansi Bapak Ibu bekerja memiliki kecukupan anggaran dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan E-SAKIP?) dan P24 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja jabatan staf yang membidangi E-SAKIP (penelaah kebijakan) tidak terjadi kekosongan?) juga memiliki tingkat penerimaan yang rendah, dengan masing-masing hanya mendapatkan 6,52% dan 8,70% respon Ya. Sementara itu, indikator P18 (Apakah di Instansi Bapak Ibu bekerja PC komputer desktop, Notebook/ Laptop jumlahnya telah terpenuhi untuk mengakses E-SAKIP?) menunjukkan bahwa hanya 35,87% responden yang menyatakan elemen tersebut telah diterapkan, sementara sisanya masih belum berfungsi secara optimal.

Secara keseluruhan, tingkat penerimaan rata-rata terhadap elemen kapasitas sistem E-SAKIP berada di angka 57,495%, dengan standar deviasi 39,311, yang menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar dalam implementasi berbagai elemen dalam sistem ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa elemen telah berjalan dengan baik, masih ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan optimalisasi agar sistem dapat lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Demak.

Tabel 5. Tingkat Element Value Pada Aplikasi Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Pemerintah Kabupaten Demak

P	Mean	Std. Deviation	Persentase Jawaban	
			Ya (%)	Tidak (%)
P29	0.840	0.370	83.70	16.30
P30	0.880	0.330	88.04	11.96
P31	0.850	0.360	84.78	15.22
P32	0.850	0.360	84.78	15.22
P33	0.850	0.360	84.78	15.22
P34	0.850	0.360	84.78	15.22
P35	0.000	0.000	0.000	100.00
			72.98	27.02

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan data yang disajikan, tingkat *Element Value* dalam penggunaan aplikasi *Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP)* di Pemerintah Kabupaten Demak menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) yang cukup tinggi pada sebagian besar indikator, yaitu berkisar antara 0.840 hingga 0.880, dengan standar deviasi antara 0.330 hingga 0.370. Persentase jawaban Ya yang menunjukkan penerimaan atau keberfungsian aplikasi dalam mendukung akuntabilitas kinerja juga relatif tinggi, berkisar antara 83.70% hingga 88.04%. Namun, terdapat satu indikator P35 (E-SAKIP digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment bagi ASN) dengan nilai *mean* 0.000 dan standar deviasi 0.000, yang menunjukkan bahwa seluruh responden menjawab Tidak (100%), menandakan bahwa aspek ini belum berfungsi atau tidak diterapkan sama sekali.

Secara keseluruhan, tingkat penerimaan terhadap elemen *Value* dalam aplikasi E-SAKIP mencapai 72.98%, sedangkan 27.02% responden menyatakan ketidaksepahaman atau ketidakberfungsian dalam beberapa aspek. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar elemen aplikasi telah berjalan dengan baik, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar sistem dapat berfungsi secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji elemen-elemen pendukung penerapan E-Government dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) di Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Government di Kabupaten Demak telah mengalami perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Tiga elemen utama, yaitu *Support*, *Capacity*, dan *Value*, memiliki peran signifikan dalam keberhasilan penerapan E-Government.

Dari segi *Support*, regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan optimalisasi. Dari aspek *Capacity*, masih terdapat kekurangan dalam hal sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi serta keterbatasan infrastruktur. Sementara dari sisi *Value*, penggunaan *E-Government* (*italic*) telah membawa manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, meskipun belum sepenuhnya maksimal.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas *E-Government* (*italic*) dalam mendukung E-SAKIP, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur digital, serta optimalisasi kebijakan dan strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Gant, J. P. (2008). Electronic Government for Developing Countries. In *International Telecommunications Union* (Issue August).
- Hamjen, H. (2023). SISTEM INFORMASI PRIORITAS UNTUK LAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA PALANGKARAYA. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 27(1).
- Indrajit, R. E. (2006). Konsep dan Strategi Electronic Government. *Electronic Government*, 84.
- Jacobus, D. Anastasia., Pangemanan, Fanley., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 3(1).
- Jatmiko, A. A., & Astuti, R. S. (2018). Analisis Pengembangan Electronic Government Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Website Pemerintah Kabupaten Demak). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4).
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136.
- Maharani, D. D., & Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M. S. dgmanar@gmail. com. (2019). Penerapan E-Planning sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak Tahun 2018 - 2019. *Theory and Practice of Public Administration*, 4 (67).
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu*
- Sahoming, P., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ALFABETA.

- Suryani dan Hendriyadi. (2016). Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 147. In *Jakarta: Prenada Media*.
- Tawakkal, G. T. I., & Subekti, T. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1).